

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Bebas Plagiasi	iii
Kata Pengantar	iv
Intisari	viii
<i>Abstract</i>	x
Daftar Isi	xii
Daftar Tabel	xix
Daftar Gambar	xxiii
Daftar Lampiran	xxvii
Daftar Singkatan	xxx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang dan Konteks Penelitian	1
1.2 Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian	16
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	19
1.3.1 Tujuan Penelitian	19
1.3.2 Manfaat Penelitian	21
1.4 Keaslian dan Kebaruan Penelitian	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	27
2.1 Konsep Kebijakan Publik, Fiskal, Desentralisasi Fiskal, dan Kesejahteraan	27
2.1.1 Konsep Kebijakan Publik	27
2.1.2 Konsep Kebijakan Fiskal	29
2.1.3 Konsep Desentralisasi Fiskal	34
2.1.4 Konsep Kesejahteraan	43
2.2 Kerangka Pikir	47
2.2.1 Kerangka Pikir untuk Pertanyaan Penelitian Spesifik Pertama dan Spesifik Kedua	47
2.2.2 Kerangka Pikir untuk Pertanyaan Penelitian Spesifik Ketiga	49
BAB III METODE PENELITIAN	52
3.1 Jenis dan Rancangan Penelitian	52
3.2 Metode Pengumpulan Data	55
3.2.1 Jenis Data	55
3.2.2 Sumber Data	56
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	57
3.3 Metode Analisis Data	59
3.3.1 Analisis Kualitatif untuk Pertanyaan Penelitian Spesifik Pertama dan Spesifik Kedua	59

3.3.2	Analisis <i>Mixed Method-Sequential Explanatory</i> untuk Pertanyaan Penelitian Spesifik Ketiga	62
3.3.2.1	Pengumpulan dan Analisis Data Kuantitatif	64
3.3.2.2	Hubungan Tahapan Kuantitatif dan Kualitatif	71
3.3.2.3	Pengumpulan Data dan Analisis Data Kualitatif	72
3.3.2.4	Integrasi Hasil Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif	73
BAB IV	KEBIJAKAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL DI INDONESIA	74
4.1	Perkembangan Kebijakan Fiskal di Bidang Perlindungan Sosial di Indonesia	75
4.1.1	Perkembangan Kebijakan Fiskal di Indonesia	75
4.1.2	Perkembangan Kebijakan Perlindungan Sosial di Indonesia	92
4.2	Kebijakan dan Pengelolaan Program Perlindungan Sosial di Indonesia Saat Ini (2014-2022)	97
4.3	Kebijakan di Bidang Perlindungan Sosial untuk Penanganan Dampak Pandemi Covid-19	107
4.4	Analisis Perkembangan Anggaran Perlindungan Sosial Dibandingkan dengan Anggaran Prioritas Lainnya: Infrastruktur	113
4.5	Analisis Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Sosial	117
4.5.1	Analisis Efektivitas Kebijakan Perlindungan Sosial pada Pemerintahan SBY dan Jokowi	117

4.5.2	Analisis Perbandingan Anggaran Belanja Sosial dan Capaian Kesejahteraan dengan Negara Lain (<i>Benchmarking Analysis</i>)	124
4.5.3	Analisis Perkembangan Anggaran Program Perlindungan Sosial terhadap Peningkatan Kesejahteraan	129
4.6	Rangkuman Bab IV	137
BAB V	KEBIJAKAN DAN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN	141
5.1	Perkembangan Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Indonesia	142
5.2	Kebijakan Transfer ke Daerah di Indonesia Saat Ini	148
5.2.1	Kebijakan Dana Perimbangan	151
5.2.1.1	Kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU)	151
5.2.1.2	Kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH)	155
5.2.1.3	Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	159
5.2.1.4	Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	162
5.2.2	Kebijakan Dana Insentif Daerah (DID)	164
5.2.3	Kebijakan Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan	166
5.2.3.1	Kebijakan Dana Otonomi Khusus (Otsus)	166
5.2.3.2	Kebijakan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	168

5.2.4	Kebijakan Dana Desa	170
5.2.5	Kebijakan Transfer ke Daerah dalam Menghadapi Pandemi Covid-19	171
5.3	Pengelolaan Anggaran Transfer ke Daerah	174
5.3.1	Penyusunan Kebijakan: Perencanaan dan Penetapan Anggaran Transfer ke Daerah	174
5.3.2	Kelembagaan Transfer ke Daerah	176
5.3.3	Penganggaran Transfer ke Daerah	178
5.3.3.1	Pengalokasian Transfer ke Daerah	178
5.3.3.2	Perkembangan Anggaran Transfer ke Daerah	180
5.3.3.3	Analisis Perkembangan Anggaran Transfer ke Daerah Dibandingkan dengan Belanja Pemerintah Pusat	182
5.4	Evaluasi Pelaksanaan Transfer ke Daerah	185
5.5	Analisis Pertumbuhan Anggaran Transfer ke Daerah terhadap Pertumbuhan Indikator Kesejahteraan pada Pemerintahan SBY dan Jokowi	199
5.6	Analisis Pengaruh DAU, DAK, dan Dana Desa terhadap Peningkatan Kesejahteraan pada Pemerintahan SBY dan Jokowi	211
5.7	Analisis APBD di Indonesia	219
5.8	Rangkuman Bab V	221

BAB VI ANALISIS PENGARUH DAK FISIK BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK BIDANG KESEHATAN, PENERIMA BANTUAN IURAN JKN, DANA DESA, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN BELANJA APBD TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	224
6.1 Pembentukan Model dan Regresi	225
6.1.1 Pembentukan Model	225
6.1.2 Proses dan Analisis Hasil Regresi	241
6.1.2.1 Proses Regresi Persamaan (6.6)	242
6.1.2.2 Proses Regresi Persamaan (6.7)	244
6.1.2.3 Pengaruh PBI JKN terhadap IPM	245
6.1.2.4 Pengaruh DAK Fisik Bidang Pendidikan terhadap IPM	246
6.1.2.5 Pengaruh DAK Fisik Bidang Kesehatan terhadap IPM	247
6.1.2.6 Pengaruh Dana Desa terhadap IPM	248
6.1.2.7 Pengaruh Variabel Lainnya terhadap IPM	249
6.1.2.8 Penjelasan Intersep Kabupaten/Kota	254
6.2 Temuan Penelitian	255
6.3 Hubungan Tahapan Kuantitatif dan Kualitatif	258
6.4 Pengumpulan Data dan Analisis Data Kualitatif	259

6.5	Integrasi Hasil Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif	267
6.6	Rangkuman Bab VI	269
BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI		270
7.1	Kesimpulan Penelitian	270
7.2	Keterbatasan Disertasi	281
7.3	Kontribusi Akademik	282
7.4	Rekomendasi Kebijakan dan Implikasi Kebijakan	284
7.5	Rekomendasi Penelitian Lebih Lanjut	295
DAFTAR PUSTAKA		296
LAMPIRAN		311

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	IPM Indonesia menurut Komponen, 2013-2020	5
Tabel 1.2	Perkembangan Indikator Pembangunan Daerah (Seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia)	7
Tabel 3.1	Metode Penelitian	54
Tabel 3.2	Teknik Pengumpulan Data Kualitatif	72
Tabel 4.1	APBN 2020, Perpres No. 72 Tahun 2020, dan APBN 2021 (dalam Triliun Rupiah)	91
Tabel 4.2	Program Bantuan Sosial, 2014-2022	97
Tabel 4.3	Tujuan Program Bantuan Sosial Tiap Bidanganya	99
Tabel 4.4	Program Perlindungan Sosial di Indonesia dengan Anggaran Terbesar, 2014-2022	101
Tabel 4.5	Jaring Pengaman Sosial Respons Pandemi Covid-19 Tahun 2020	110
Tabel 4.6	Bentuk Penganggaran Infrastruktur	114
Tabel 4.7	Uji Signifikansi Hubungan Anggaran Peningkatan Kesejahteraan dengan Capaian Kesejahteraan Era SBY ..	120
Tabel 4.8	Uji Signifikansi Hubungan Anggaran Peningkatan Kesejahteraan dengan Indikator Capaian Kesejahteraan Era Jokowi	123

Tabel 4.9	Perbandingan Anggaran Peningkatan Kesejahteraan dan Capaian di Bidang Kesejahteraan pada Pemerintahan SBY dan Jokowi	124
Tabel 4.10	Anggaran Belanja Sosial Beberapa Negara, Tahun 2019 (% terhadap PDB)	125
Tabel 4.11	Indeks Pembangunan Manusia Beberapa Negara Tahun 2019	126
Tabel 4.12	Uji Signifikansi Hubungan PIP dengan IPM, 2015-2019	131
Tabel 4.13	Uji Signifikansi Hubungan PKH dengan Kemiskinan, 2015-2019	133
Tabel 4.14	Uji Signifikansi Hubungan Subsidi dengan IPM, 2015- 2019	135
Tabel 4.15	Uji Signifikansi Hubungan PBI JKN dengan IPM, 2015- 2019	136
Tabel 5.1	Komponen Transfer ke Daerah dalam APBN Tahun 2022	147
Tabel 5.2	Bobot Variabel Perhitungan DAU menurut UU No. 33 Tahun 2004	152
Tabel 5.3	Pembagian Penerimaan Negara untuk Dana Bagi Hasil sesuai UU HKPD (% terhadap Total Penerimaan Negara)	156
Tabel 5.4	Perkembangan Anggaran Transfer ke Daerah dan Capaian Indikator Kesejahteraan Provinsi di Indonesia, 2010-2020	186

Tabel 5.5	Uji Signifikansi Hubungan Transfer ke Daerah dengan IPM, 2010-2020	189
Tabel 5.6	Uji Signifikansi Hubungan Transfer ke Daerah dengan Kemiskinan, 2010-2020	191
Tabel 5.7	Uji Signifikansi Hubungan Transfer ke Daerah dengan Rasio Gini, 2010-2020	193
Tabel 5.8	Uji Signifikansi Hubungan Transfer ke Daerah dengan PDRB/Kapita, 2010-2020	195
Tabel 5.9	Uji Signifikansi Hubungan Transfer ke Daerah dengan IPM (Era SBY & Jokowi)	202
Tabel 5.10	Uji Signifikansi Hubungan Transfer ke Daerah dengan Kemiskinan (Era SBY & Jokowi)	205
Tabel 5.11	Uji Signifikansi Hubungan Transfer ke Daerah dengan Rasio Gini (Era SBY & Jokowi)	208
Tabel 5.12	Uji Signifikansi Hubungan Transfer ke Daerah dengan PDRB/Kapita (Era SBY & Jokowi)	210
Tabel 5.13	Uji Signifikansi Hubungan DAU dengan IPM dan Kemiskinan (Era SBY dan Jokowi)	213
Tabel 5.14	Uji Signifikansi Hubungan DAK dengan IPM dan Kemiskinan (Era SBY dan Jokowi)	216
Tabel 5.15	Uji Signifikansi Hubungan Dana Desa dengan IPM dan Kemiskinan (Era SBY dan Jokowi)	218

Tabel 5.16	Total Realisasi APBD Kabupaten/Kota pada Seluruh Provinsi di Indonesia (Rata-Rata Realisasi APBD Tahun 2016-2018) (dalam Triliun Rupiah)	220
Tabel 6.1	Penjelasan Variabel Penelitian	237
Tabel 6.2	Tes Uji Chow Persamaan (6.6) (CEM atau FEM)	242
Tabel 6.3	Tes Uji Hausman Persamaan (6.6) (FEM atau REM)	242
Tabel 6.4	Hasil Regresi Model Pengaruh antara DAK Fisik Bidang Pendidikan, DAK Fisik Bidang Kesehatan, PBI JKN, APM, dan Jumlah Tenaga Kesehatan terhadap IPM	243
Tabel 6.5	Hasil Regresi Model Pengaruh antara Belanja APBD, PAD, PDRB per Kapita, Dana Desa, dan Jumlah Penduduk Miskin terhadap IPM	244
Tabel 6.6	Inventarisasi Pengaruh Variabel Penelitian terhadap IPM (berdasarkan Regresi Model Kuantitatif)	258
Tabel 7.1	Mekanisme Pengintegrasian Program Perlindungan Sosial	291

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Perkembangan Anggaran Perlindungan Sosial, 2013-2020	4
Gambar 1.2	Hubungan antara Latar Belakang dan Pertanyaan Penelitian	20
Gambar 2.1	Ilustrasi Kebijakan Fiskal	31
Gambar 2.2	Kerangka Pikir Pertanyaan Penelitian Spesifik Pertama dan Spesifik Kedua	48
Gambar 2.3	Kerangka Pikir Pertanyaan Penelitian Spesifik Ketiga	50
Gambar 2.4	Kerangka Analisis Dampak Kebijakan Fiskal	51
Gambar 3.1	Langkah Analisis Penelitian Kualitatif	59
Gambar 3.2	Desain Prosedur <i>Mixed-Sequential Explanatory</i>	63
Gambar 3.3	<i>Scatter Plot</i> Rata-Rata IPM dan PDRB/Kapita, 2015-2018	64
Gambar 3.4	<i>Scatter Plot</i> Rata-Rata IPM, 2015-2018	65
Gambar 3.5	<i>Scatter Plot</i> Rata-Rata PDRB/Kapita, 2015-2018	65
Gambar 4.1	Perkembangan Defisit APBN Era Soekarno	78
Gambar 4.2	Perkembangan APBN Era Soeharto, 1969/1970-1997/1998	81
Gambar 4.3	Perkembangan APBN Era Reformasi, 1998/1999-2004 ...	83
Gambar 4.4	Perkembangan APBN Era SBY, 2005-2014	85

Gambar 4.5	Perkembangan APBN Era Jokowi, 2015-2019	87
Gambar 4.6	Perkembangan APBN Era Jokowi, 2020-2021 (Masa Covid-19)	89
Gambar 4.7	Perkembangan Defisit APBN terhadap PDB (dalam %) ..	90
Gambar 4.8	Bentuk Stimulus untuk Penanganan Covid-19	108
Gambar 4.9	Anggaran Perlindungan Sosial dan Infrastruktur	115
Gambar 4.10	Hubungan Anggaran Peningkatan Kesejahteraan dengan Capaian Kesejahteraan Era SBY	120
Gambar 4.11	Hubungan Anggaran Peningkatan Kesejahteraan dan Capaian Kesejahteraan Era Jokowi	122
Gambar 4.12	Perbandingan Anggaran Bantuan Sosial dan IPM pada Beberapa Negara, Tahun 2019	128
Gambar 4.13	Hubungan Belanja Sosial dengan IPM pada Beberapa Negara	129
Gambar 4.14	Hubungan antara PIP dengan IPM, 2015-2019	130
Gambar 4.15	Hubungan antara PKH dengan Kemiskinan, 2015-2019 ..	132
Gambar 4.16	Hubungan antara Subsidi dengan IPM, 2015-2019	134
Gambar 4.17	Hubungan antara PBI JKN dengan IPM, 2015-2019	136
Gambar 5.1	Mekanisme Penetapan Alokasi Dana Transfer ke Daerah	179
Gambar 5.2	Perkembangan Dana Transfer ke Daerah, 2005-2020	182

Gambar 5.3	Perkembangan Anggaran Transfer ke Daerah Dibandingkan dengan Belanja Pemerintah Pusat	184
Gambar 5.4	Hubungan Pertumbuhan Anggaran Transfer ke Daerah dengan IPM, 2010-2020	188
Gambar 5.5	Hubungan Pertumbuhan Anggaran Transfer ke Daerah dengan Penurunan Kemiskinan, 2010-2020	190
Gambar 5.6	Hubungan Pertumbuhan Anggaran Transfer ke Daerah dengan Rasio Gini, 2010-2020	192
Gambar 5.7	Hubungan Pertumbuhan Anggaran Transfer ke Daerah dengan PDRB/Kapita, 2010-2020	194
Gambar 5.8	Hubungan Pertumbuhan Transfer ke Daerah dengan IPM (Era SBY & Jokowi)	201
Gambar 5.9	Hubungan Pertumbuhan Transfer ke Daerah dengan Kemiskinan (Era SBY & Jokowi)	204
Gambar 5.10	Hubungan Pertumbuhan Transfer ke Daerah dengan Rasio Gini (Era SBY & Jokowi)	207
Gambar 5.11	Hubungan Pertumbuhan Transfer ke Daerah dengan PDRB/Kapita (Era SBY & Jokowi)	209
Gambar 5.12	Hubungan Pertumbuhan DAU dengan IPM dan Kemiskinan (Era SBY & Jokowi)	212
Gambar 5.13	Hubungan Pertumbuhan DAK dengan IPM dan Kemiskinan (Era SBY & Jokowi)	215
Gambar 5.14	Hubungan Pertumbuhan Dana Desa dengan IPM dan Kemiskinan (Era SBY & Jokowi)	218

Gambar 6.1	Alur Pembentukan Model	232
------------	------------------------------	-----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	<i>Scatter Plot</i> Hubungan Anggaran Peningkatan Kesejahteraan dengan Capaian Kesejahteraan Era SBY	311
Lampiran 2	Uji Signifikansi Hubungan Anggaran Peningkatan Kesejahteraan dengan Capaian Kesejahteraan Era SBY	312
Lampiran 3	<i>Scatter Plot</i> Hubungan Anggaran Peningkatan Kesejahteraan dengan Capaian Kesejahteraan Era Jokowi	313
Lampiran 4	Uji Signifikansi Hubungan Anggaran Peningkatan Kesejahteraan dengan Capaian Kesejahteraan Era Jokowi	314
Lampiran 5	Hubungan Belanja Bantuan Sosial dengan IPM pada Beberapa Negara	315
Lampiran 6	Hubungan antara PIP dengan IPM	316
Lampiran 7	Hubungan antara PKH dengan Kemiskinan	317
Lampiran 8	Hubungan antara Subsidi dengan IPM	318
Lampiran 9	Hubungan antara PBI JKN dengan IPM	319
Lampiran 10	Hubungan antara Transfer ke Daerah dengan IPM	320
Lampiran 11	Hubungan antara Transfer ke Daerah dengan Kemiskinan	321
Lampiran 12	Hubungan antara Transfer ke Daerah dengan Rasio Gini	322

Lampiran 13	Hubungan antara Transfer ke Daerah dengan PDRB per Kapita	323
Lampiran 14	Hubungan antara Transfer ke Daerah dengan IPM (Era SBY dan Jokowi)	324
Lampiran 15	Uji Signifikansi Hubungan antara Transfer ke Daerah dengan IPM (Era SBY dan Jokowi)	325
Lampiran 16	Hubungan antara Transfer ke Daerah dengan Kemiskinan (Era SBY dan Jokowi)	326
Lampiran 17	Uji Signifikansi Hubungan antara Transfer ke Daerah dengan Kemiskinan (Era SBY dan Jokowi)	327
Lampiran 18	Hubungan antara Transfer ke Daerah dengan Rasio Gini (Era SBY dan Jokowi)	328
Lampiran 19	Uji Signifikansi Hubungan antara Transfer ke Daerah dengan Rasio Gini (Era SBY dan Jokowi)	329
Lampiran 20	Hubungan antara Transfer ke Daerah dengan PDRB per Kapita (Era SBY dan Jokowi)	330
Lampiran 21	Uji Signifikansi Hubungan antara Transfer ke Daerah dengan PDRB per Kapita (Era SBY dan Jokowi)	331
Lampiran 22	Hubungan antara DAU dengan IPM dan Kemiskinan (Era SBY & Jokowi)	332
Lampiran 23	Uji Signifikansi Hubungan antara DAU dengan IPM dan Kemiskinan (Era SBY & Jokowi)	334
Lampiran 24	Hubungan antara DAK dengan IPM dan Kemiskinan (Era SBY & Jokowi)	336
Lampiran 25	Uji Signifikansi Hubungan antara DAK dengan IPM dan Kemiskinan (Era SBY & Jokowi)	338
Lampiran 26	Hubungan antara Dana Desa dengan IPM dan Kemiskinan, 2015-2020	340
Lampiran 27	Uji Signifikansi Hubungan antara Dana Desa dengan IPM dan Kemiskinan, 2015-2020	341

Lampiran 28	Data IPM, DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Pendidikan, Dana Desa, PBI	342
	Data Belanja APBD (Barang, Modal, Sosial, Pegawai) dan PAD	348
	Data Penduduk Miskin, APM SD s/d SMA, Tenaga Kesehatan, PDRB/Kapita	353
Lampiran 29	Koefisien Korelasi pada Persamaan (6.6) dan (6.7)	358
Lampiran 30	Tes Uji Chow Persamaan (6.6) (CEM atau FEM)	359
Lampiran 31	Tes Uji Hausman Persamaan (6.6) (FEM atau REM) ..	360
Lampiran 32	Hasil Regresi Persamaan (6.6)	362
Lampiran 33	Hasil Regresi Persamaan (6.7)	365
Lampiran 34	Hasil Regresi Persamaan (6.6) dan Persamaan (6.7) Digabung	368
Lampiran 35	Uji Klasik Persamaan (6.6)	371
Lampiran 36	Uji Klasik Persamaan (6.7)	373
Lampiran 37	Pemilihan Parameter Wawancara/Diskusi	375
	Rangkuman Hasil Wawancara/Diskusi	377